



Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia

Lokot Muda Harahap¹, Nitasari Lasma Uhur Sidebang², Reginawati Sitompul³,
Rosi Dearan S Lingga⁴, Tiarasi G. Pakpahan⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email Korespondensi: nitasarisidebang90@gmail.com

Submitted: 24 Maret 2025; Accepted: 05 April 2025; Published: 09 April 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pelatihan, banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam memahami prosedur dan memanfaatkan kebijakan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, termasuk system perizinan yang belum sepenuhnya digital, perbedaan kebijakan insentif pajak antar daerah, dan birokrasi yang rumit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, dukungan yang lebih baik dan penyederhanaan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bagi UMKM. Saran yang diberikan mencakup peningkatan sosialisasi, bimbingan teknis, perbaikan infrastruktur, evaluasi kebijakan secara berkala, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan,

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, UMKM, Pembangunan Ekonomi, Pengembangan UMKM, Usaha Mikro

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan karena mereka menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Selain itu, UMKM meningkatkan daya saing negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun memiliki fungsi penting, UMKM di Indonesia menghadapi banyak hambatan yang menghalangi kemajuan mereka. Akses ke pembiayaan, keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan dan pengembangan bakat, dan kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas adalah beberapa tantangan tersebut. Dalam situasi ini, kebijakan pemerintah adalah komponen penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Kebijakan yang tepat dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, inovasi, dan akses pasar, sedangkan kebijakan yang tidak mendukung dapat memperburuk kondisi yang dihadapi oleh UMKM. Berbagai program pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Mankiw (2014) menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus mampu membuat lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. Namun, masih perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berfungsi dengan baik. Banyak UMKM belum merasakan dampak positif dari kebijakan yang ada, menurut penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryana (2013), yang menyatakan bahwa meskipun ada kebijakan pemerintah, mereka seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan pelaku UMKM. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap UMKM dan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha saat menerapkan kebijakan tersebut. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan dapat membantu dalam membuat strategi yang lebih baik untuk mendukung UMKM. Kebijakan pemerintah, serta dampaknya terhadap UMKM di Indonesia, dapat berkontribusi pada strategi ini. Pertama, penting untuk menentukan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program dan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk membuat akses pembiayaan menjadi lebih mudah bagi UMKM. Penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp 300 triliun pada tahun 2021, menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu



sektor ini (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Untuk meningkatkan kemampuan UMKM, juga telah diperkenalkan kebijakan seperti pelatihan kewirausahaan dan program inkubasi bisnis.

Selanjutnya, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti peningkatan kapasitas produksi, peningkatan akses ke pasar, dan peningkatan daya saing UMKM baik di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai contoh, sebuah studi oleh Rahman dan Setiawan (2021) menemukan bahwa UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan melalui KUR mengalami peningkatan penjualan hingga 30% dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu pertumbuhan UMKM secara signifikan. Seorang ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, mengatakan bahwa "kebijakan yang mendukung akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM sangat penting untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global" (Hartono, 2020). Meskipun ada banyak kebijakan yang mendukung, tantangan dalam menerapkan kebijakan juga perlu diidentifikasi. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) masih kesulitan mendapatkan informasi tentang program-program pemerintah dan birokrasi yang rumit untuk mendapatkan pinjaman. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi UMKM Indonesia menemukan bahwa sekitar 60% pelaku UMKM mengalami kesulitan memahami syarat dan prosedur pengajuan KUR (Asosiasi UMKM Indonesia, 2022). Selain itu, UMKM menghadapi tantangan dalam memanfaatkan kebijakan yang ada karena mereka tidak menerima dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah. Seorang peneliti kewirausahaan Dr. Siti Nurjanah menyatakan bahwa "Tanpa adanya pendampingan yang memadai, banyak UMKM yang tidak dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah secara optimal" (Nurjanah, 2021).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berperan penting dalam pertumbuhan UMKM melalui intervensi kewirausahaan, kebijakan moneter, dan pembinaan teknologi digital (Ramadhona et al., 2023; Salami et al., 2023). Di Indonesia, reformasi regulasi, insentif pajak, dan bantuan keuangan bertujuan meningkatkan daya saing UMKM (Novitasari, 2023; Rungani & Ward, 2023). Namun, birokrasi yang kompleks serta implementasi yang tidak konsisten menjadi tantangan utama (Maurina & Rusdianto, 2023). Kebijakan pemerintah juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang mencerminkan pilihan pemerintah dalam mengatur kepentingan umum. Efektivitasnya bergantung pada harmonisasi antara kebijakan yang dirancang dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Pengembangan UMKM di Indonesia

UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan di Indonesia (Maurina & Rusdianto, 2023; Novitasari, 2023; Prasetyo & Ellitan, 2023; Triyani et al., 2023). Sektor ini terbukti tangguh dalam menghadapi krisis serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial (Jalunggono et al., 2022). Namun, keterbatasan modal menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan, terutama bagi UMKM yang berada di daerah kurang berkembang. Dengan adaptabilitas dan inovasi yang tinggi, UMKM dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Pengembangan UMKM mencakup berbagai aspek, seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi (Fadilah, 2012). Proses ini melibatkan identifikasi peluang, pemilihan strategi yang tepat, implementasi, serta evaluasi untuk mengurangi risiko usaha. Selain itu, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan pendapatan tahunannya. Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional menegaskan pentingnya peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan devisa negara (Pakpahan, 2020; Prasetyo et al., 2019). Dengan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, pemanfaatan sumber online, serta analisis data perkembangan UMKM dari tahun ke tahun. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



(UMKM) berdasarkan penelitian sebelumnya dan sumber terpercaya. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai sumber online seperti laporan kementerian, organisasi internasional, dan media yang kredibel. Selain itu, data perkembangan UMKM dari tahun ke tahun digunakan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan serta dampak kebijakan yang diterapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait kebijakan UMKM, serta eksplorasi sumber online termasuk artikel berita dan publikasi lembaga riset. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tahapan mengidentifikasi kebijakan yang berpengaruh terhadap UMKM, mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan aspek regulasi, pendanaan, pelatihan, dan insentif, serta mengevaluasi dampaknya berdasarkan data yang tersedia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Positif Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah memiliki peranan strategis dalam mempercepat pertumbuhan dan daya saing UMKM. Kebijakan yang efektif dapat mencakup akses pembiayaan yang lebih mudah, program pelatihan yang meningkatkan keterampilan pelaku usaha, serta pengurangan regulasi yang menghambat perkembangan bisnis.

1. Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah

Pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlanjutan UMKM. Tanpa modal yang cukup, UMKM akan kesulitan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, atau memperluas jangkauan pasar. Menurut Beck et al. (2005), akses terhadap pembiayaan menjadi kendala utama bagi UMKM di negara berkembang, karena terbatasnya sumber modal dan sulitnya memenuhi persyaratan perbankan. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan kredit berbunga rendah bagi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2021), penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp 300 triliun, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Rahman dan Setiawan (2021) dalam jurnal mereka menemukan bahwa UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan melalui KUR mengalami peningkatan penjualan hingga 30% dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan skala usaha dan produktivitas UMKM.

Selain KUR, terdapat kebijakan lain seperti program Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan pembiayaan bagi UMKM yang belum memiliki akses ke perbankan formal. Menurut Mardiasmo (2018), skema pembiayaan ini membantu memperluas jangkauan modal ke sektor informal, yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan finansial. Namun, meskipun program ini membawa dampak positif, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Studi dari Asosiasi UMKM Indonesia (2022) menemukan bahwa sekitar 60% pelaku UMKM masih kesulitan memahami prosedur pengajuan KUR. Oleh karena itu, menurut Nurjanah (2021), pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar lebih banyak UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini.

2. Program Pelatihan dan Pendampingan bagi UMKM

Selain akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan UMKM. Porter (1990) dalam teori daya saingnya menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja dan inovasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Salah satunya adalah Program Wirausaha Pemula (WP) yang bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada pelaku usaha baru. Menurut Prasetyo dan Ellitan (2023), program ini membantu UMKM dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Selain itu, terdapat program Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang menawarkan pelatihan dan pendampingan digitalisasi UMKM. Menurut Salami et al. (2023), program ini memberikan manfaat besar dalam



meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.

Penelitian oleh Hartono (2020) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan mengalami peningkatan efisiensi produksi hingga 25% dalam setahun. Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis. Namun, tantangan dalam program pelatihan ini adalah kurangnya kesinambungan antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan nyata di lapangan. Maurina dan Rusdianto (2023) mencatat bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sinergi antara pelatihan, akses pasar, dan pembiayaan agar dampak kebijakan lebih optimal.

3. Pengurangan Regulasi dan Reformasi Kebijakan untuk UMKM

Regulasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM. Menurut World Bank (2020), salah satu kendala utama bagi UMKM di negara berkembang adalah birokrasi yang berbelit-belit, yang menghambat akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang menyederhanakan regulasi dan birokrasi dapat memberikan dampak positif bagi UMKM. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi regulasi untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha dan memberikan insentif bagi UMKM yang ingin beroperasi secara legal. Menurut Novitasari (2023), kebijakan ini membantu meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi, sehingga lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan dukungan pemerintah. Selain itu, reformasi pajak juga dilakukan untuk memberikan keringanan bagi UMKM. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan. Menurut penelitian oleh Rungani dan Ward (2023), insentif pajak ini mendorong lebih banyak UMKM untuk berkembang secara formal dan meningkatkan transparansi keuangan mereka.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan. Penelitian oleh Maurina dan Rusdianto (2023) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disederhanakan, banyak UMKM masih kesulitan dalam memahami perubahan kebijakan dan mengakses informasi yang relevan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang lebih baik dari pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM.

B. Dampak Negatif Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, beberapa kebijakan masih memiliki dampak negatif yang menghambat perkembangan sektor ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta kurangnya dukungan infrastruktur menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM (Maurina & Rusdianto, 2023). Jika tidak ditangani dengan baik, hambatan-hambatan ini dapat menghambat daya saing UMKM dan mengurangi efektivitas program-program yang sudah berjalan.

1. Birokrasi yang Kompleks dan Regulasi yang Tidak Ramah UMKM

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses dukungan pemerintah adalah birokrasi yang berbelit-belit. Studi dari World Bank (2020) menyebutkan bahwa regulasi yang kompleks dapat memperlambat pertumbuhan UMKM dan menghambat inovasi. Hal ini dikarenakan banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian administratif untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Survei Asosiasi UMKM Indonesia (2022), sekitar 60% pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Proses yang panjang dan persyaratan yang ketat sering kali membuat UMKM enggan mengajukan pinjaman, meskipun program tersebut dirancang untuk membantu mereka. Penelitian oleh Nurjanah (2021) menunjukkan bahwa tanpa adanya pendampingan yang memadai, banyak UMKM yang kesulitan untuk memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan. Selain itu, perizinan usaha yang masih memerlukan banyak tahapan juga menjadi tantangan besar. Meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, penelitian oleh Novitasari (2023) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, implementasi kebijakan ini masih belum optimal. Banyak pelaku UMKM yang tetap mengalami kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) atau perizinan lainnya karena sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.



Dalam hal regulasi pajak, meskipun pemerintah telah memberikan insentif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun (UU No. 7 Tahun 2021), pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. Menurut penelitian Rungani & Ward (2023), banyak UMKM yang masih bingung dengan mekanisme perpajakan dan pencatatan keuangan yang diperlukan, sehingga mereka tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak meskipun ada insentif yang diberikan.

2. Implementasi Kebijakan yang Tidak Konsisten

Masalah lain yang sering dihadapi UMKM adalah ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun banyak kebijakan telah dibuat untuk mendukung UMKM, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dalam implementasi program-program tersebut (Maurina & Rusdianto, 2023). Menurut Suryana (2013), banyak kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendukung UMKM tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan pelaku usaha. Sebagai contoh, program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM di berbagai sektor. Penelitian oleh Prasetyo & Ellitan (2023) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang merasa pelatihan yang diberikan terlalu teoritis dan kurang aplikatif terhadap kondisi bisnis mereka.

Selain itu, penyaluran bantuan bagi UMKM juga sering kali tidak merata. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM. Namun, studi dari Jalunggono et al. (2022) menemukan bahwa banyak UMKM di daerah terpencil yang tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses informasi dan kendala administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, implementasi yang kurang optimal dapat mengurangi efektivitasnya. Menurut Hartono (2020), perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga sering kali menyebabkan kebingungan bagi pelaku UMKM. Misalnya, beberapa daerah memiliki kebijakan insentif pajak yang berbeda-beda, sehingga UMKM yang beroperasi di berbagai wilayah harus beradaptasi dengan peraturan yang tidak seragam. Hal ini menambah beban administratif bagi UMKM dan mengurangi efisiensi operasional mereka.

3. Kurangnya Dukungan Infrastruktur dan Teknologi bagi UMKM

Selain masalah regulasi dan implementasi kebijakan, kurangnya infrastruktur yang memadai juga menjadi kendala bagi pertumbuhan UMKM. Infrastruktur yang kurang baik, seperti keterbatasan akses internet dan transportasi, dapat menghambat UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan mengadopsi teknologi digital (Salami et al., 2023). Menurut penelitian Ramadhona et al. (2023), banyak UMKM di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam mengakses pasar digital karena terbatasnya konektivitas internet. Padahal, digitalisasi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMKM yang berlokasi di daerah perkotaan lebih cepat beradaptasi dengan platform digital dibandingkan dengan UMKM di daerah terpencil. Selain infrastruktur digital, masalah logistik juga menjadi kendala besar bagi UMKM yang ingin berkembang ke pasar nasional maupun internasional. Menurut Pakpahan (2020), biaya logistik yang tinggi dan sistem distribusi yang kurang efisien membuat banyak UMKM kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini diperparah dengan minimnya fasilitas pergudangan dan pusat distribusi yang dikhususkan untuk UMKM.

Dalam hal inovasi teknologi, banyak UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru karena kurangnya pelatihan dan akses terhadap alat produksi yang modern. Penelitian oleh Triyani et al. (2023) menemukan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan metode produksi tradisional yang kurang efisien. Sementara itu, UMKM yang berhasil mengadopsi teknologi cenderung mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan.

C. Perbandingan antara Kebijakan yang Berbeda terhadap UMKM

Kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM tidak bersifat seragam dan dapat bervariasi di setiap daerah atau sektor. Perbedaan dalam kebijakan ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis yang mempengaruhi kebutuhan dan tantangan UMKM di masing-masing wilayah. Menurut Novitasari (2023), keberhasilan suatu kebijakan dalam mendorong pertumbuhan UMKM sangat bergantung pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik para pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan antara kebijakan yang diterapkan di berbagai daerah atau sektor untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi.

1. Perbandingan Kebijakan Akses Pembiayaan bagi UMKM



Akses pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun implementasinya di berbagai daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

- KUR di Perkotaan vs. Pedesaan

Menurut penelitian oleh Rahman dan Setiawan (2021), UMKM di daerah perkotaan lebih mudah mengakses KUR dibandingkan dengan UMKM di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keberadaan kantor perbankan yang lebih banyak di kota, serta tingkat literasi keuangan yang lebih

tinggi di kalangan pelaku usaha perkotaan. Di sisi lain, penelitian oleh Maurina dan Rusdianto (2023) menemukan bahwa UMKM di daerah pedesaan seringkali kesulitan mengakses pembiayaan karena kurangnya informasi dan pendampingan dalam mengurus administrasi perbankan. Banyak pelaku UMKM di pedesaan yang tidak memiliki dokumen legalitas usaha yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman, sehingga mereka tetap bergantung pada sumber pembiayaan informal.

- Program Pembiayaan Alternatif

Selain KUR, beberapa daerah juga mengembangkan program pembiayaan alternatif. Misalnya, di Jawa Tengah, pemerintah daerah menerapkan skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang ditujukan bagi UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan formal. Menurut penelitian oleh Pakpahan (2020), skema UMi lebih fleksibel dibandingkan dengan KUR karena persyaratannya lebih sederhana dan dana dapat diakses dengan cepat. Namun, di beberapa daerah yang belum memiliki skema pembiayaan alternatif seperti UMi, UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh modal. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan di tingkat daerah dapat mempengaruhi efektivitas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

2. Perbandingan Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan UMKM

Pelatihan dan pendampingan merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Namun, efektivitas program pelatihan sangat bergantung pada metode yang digunakan serta relevansinya dengan kebutuhan pelaku usaha.

- Program Pelatihan di Daerah Perkotaan vs. Pedesaan

Penelitian oleh Triyani et al. (2023) menemukan bahwa UMKM di daerah perkotaan lebih banyak mendapatkan akses ke pelatihan dibandingkan dengan UMKM di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya lebih banyak pusat pelatihan dan inkubator bisnis di kota-kota besar, serta dukungan dari sektor swasta yang lebih aktif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM.

Di daerah pedesaan, banyak pelatihan yang diberikan masih bersifat umum dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik pelaku usaha. Menurut Hartono (2020), salah satu kelemahan dalam program pelatihan pemerintah adalah kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan lokal, sehingga banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa materi yang diberikan tidak relevan dengan tantangan yang mereka hadapi.

- Digitalisasi dalam Program Pelatihan

Perbedaan kebijakan dalam pelatihan juga terlihat dalam penerapan digitalisasi. Beberapa daerah yang lebih maju dalam infrastruktur digital telah mulai mengadopsi pelatihan berbasis teknologi, seperti e-learning dan webinar. Menurut Salami et al. (2023), UMKM yang mendapatkan pelatihan berbasis digital lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih mampu memanfaatkan platform e-commerce dibandingkan dengan UMKM yang hanya mengandalkan pelatihan konvensional. Namun, di daerah dengan infrastruktur digital yang kurang berkembang, program pelatihan berbasis teknologi belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam adopsi teknologi antara UMKM di perkotaan dan di pedesaan.

3. Perbandingan Kebijakan Regulasi dan Insentif Pajak

Regulasi yang mendukung serta insentif pajak merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM. Namun, perbedaan kebijakan di tingkat nasional dan daerah sering kali menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

- Regulasi Perizinan di Berbagai Daerah

Salah satu kebijakan penting yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha adalah UU Cipta Kerja, yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko. Menurut penelitian oleh Novitasari (2023), daerah yang telah menerapkan sistem ini dengan baik mengalami peningkatan jumlah UMKM yang



mendaftar secara resmi, karena proses perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat. Namun, di beberapa daerah, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan. Penelitian oleh Maurina dan Rusdianto (2023) menemukan bahwa di beberapa wilayah, sistem perizinan masih berjalan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital, sehingga pelaku UMKM tetap mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas usaha mereka.

- Perbedaan dalam Kebijakan Insentif Pajak

Pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Namun, beberapa daerah juga memiliki kebijakan tambahan yang mendukung UMKM secara lebih spesifik.

Sebagai contoh, pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif pajak tambahan bagi UMKM yang terlibat dalam ekonomi kreatif, sementara beberapa daerah lain hanya mengadopsi kebijakan pajak dari pemerintah pusat tanpa memberikan tambahan insentif. Menurut Rungani & Ward (2023), daerah yang memberikan insentif pajak tambahan cenderung memiliki pertumbuhan UMKM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang hanya mengandalkan kebijakan pusat. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak UMKM yang masih kesulitan memahami kebijakan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa selain insentif pajak, diperlukan edukasi yang lebih baik agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal.

3.1 Pembahasan

Wajib memiliki bagian pembahasan yang menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian sehubungan dengan hipotesis yang di ambil dalam penelitian. Pada sub bagian pembahasan juga membandingkan dengan kajian dari hasil penelitian sejenis yang di gunakan pada bagian pendahuluan. Rujukan juga wajib ada dalam bagian ini.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah berperan besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, serta reformasi kebijakan regulasi telah membantu meningkatkan akses terhadap modal, daya saing usaha, serta kapasitas produksi UMKM. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya pendampingan, serta keterbatasan dalam infrastruktur dan akses teknologi. Meskipun kebijakan yang diterapkan memiliki dampak positif, implementasinya belum merata di seluruh wilayah. UMKM yang beroperasi di daerah perkotaan lebih mudah memperoleh manfaat dibandingkan dengan yang berada di pedesaan, yang seringkali menghadapi hambatan administratif serta keterbatasan informasi. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan kebijakan antarwilayah juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat efektivitas program-program pemerintah.

Adapun Saran dari Penelitian ini:

1. *Menyederhanakan Regulasi dan Proses Administrasi*

Pemerintah disarankan untuk menyusun sistem birokrasi yang lebih efisien, terutama dalam hal perizinan dan akses pembiayaan. Digitalisasi dalam layanan administrasi dapat menjadi solusi untuk mempermudah UMKM dalam mengakses program bantuan yang telah tersedia.

2. *Meningkatkan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis*

Mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mengakses fasilitas pemerintah, perlu ada peningkatan sosialisasi serta program pendampingan yang lebih intensif agar kebijakan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh UMKM.

3. *Memperbaiki Infrastruktur dan Mendorong Digitalisasi*

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal untuk memastikan bahwa UMKM di wilayah tersebut mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar digital.

4. *Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan*

Program yang telah diterapkan sebaiknya dievaluasi secara berkala guna mengidentifikasi kendala yang ada dan menyesuaikan kebijakan agar lebih efektif dalam mendukung UMKM di berbagai kondisi dan lokasi.



5. Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi

Agar dukungan terhadap UMKM lebih optimal, diperlukan kerja sama dengan sektor swasta dan institusi akademik dalam penyediaan pelatihan, inovasi teknologi, serta pembiayaan alternatif guna memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Terimakasih kepada dosen Pengampu, Pak Lokot yang telah membimbing sehingga Jurnal ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada rekan-rekan sekelompok dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi UMKM Indonesia. (2022). *Survei Keterjangkauan Program KUR bagi UMKM*. Jakarta: Asosiasi UMKM Indonesia.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter? *The Journal of Finance*, 60(1), 137-177
- Fadilah, A. (2012). *Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Pustaka Mitra.
- Hartono, R. (2020). "Kebijakan Ekonomi dan Daya Saing UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Jalunggono, G., et al. (2022). *UMKM dan Inklusi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Simangunsong, S. R., Tanjung, A. A., & Siahaan, S. D. N. (2021). Analisis Dampak Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, vol. 2, no. 1, pp. 8–12.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maurina, R., & Rusdianto, H. (2023). *Birokrasi dan Tantangan Implementasi Kebijakan UMKM di Indonesia*. Bandung: CV. Ilmu Mandiri.
- Novitasari, D. (2023). *Strategi Kebijakan dalam Pengembangan UMKM*. Surabaya: Penerbit Nusantara.
- Nurjanah, S. (2021). "Peran Pendampingan dalam Pengembangan UMKM." *Jurnal Kewirausahaan*.
- Pakpahan, R. (2020). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- Prasetyo, A., & Ellitan, L. (2023). *UMKM dan Inovasi Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahman, A., & Setiawan, B. (2021). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Ramadhona, T., et al. (2023). *Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap UMKM*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rungani, E., & Ward, M. (2023). *Insentif Pajak dan Reformasi Regulasi untuk UMKM*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Rakyat.
- Salami, A., et al. (2023). *Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengembangan UMKM*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyani, R., et al. (2023). *UMKM dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Rakyat.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- World Bank. (2020). *Doing Business Report 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank Group.